



Implementasi Konseling Multikultural dalam Menangani Konflik Diskriminasi Bahasa di Sekolah

Delpina R. Markus Manda^{1*}, Vera Nika Lisubua², Jeane Marieske³, Ronaldo Stefanus⁴

¹⁻⁴ Bimbingan dan Konseling Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

Email: delpinarambung@gmail.com¹, veranikalisubua@gmail.com², marieskejeane@gmail.com³, ronaldo1607s@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: delpinarambung@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze and synthesize findings from various scientific literature on the implementation of multicultural counseling as an effective intervention in addressing language discrimination conflicts in school environments. Language discrimination (linguisticism) is a social justice issue that seriously impacts the psychological well-being and academic outcomes of minority students. Unfair treatment of someone based on their language is not only a social issue but can also cause students to feel sad and stressed, and can affect their grades or academic achievement. The research method used was a Systematic Literature Review, which focused on an in-depth analysis of the concept of multicultural competence and the role of counselor advocacy in a linguistic context. The results of this study indicate that culturally respectful counseling can be an effective method to address language discrimination, by championing changes in the school system and making counselors more sensitive to cultural differences. This study concludes that the implementation of multicultural counseling is an effective way to create a fair learning environment and respect linguistic diversity.*

Keywords: *Counselor Competence; Language Discrimination; Literature Review; Multicultural Counseling; Social Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggabungkan temuan-temuan dari berbagai literatur ilmiah mengenai implementasi konseling multikultural sebagai intervensi yang efektif dalam menangani konflik diskriminasi bahasa di lingkungan sekolah. Diskriminasi bahasa (*linguicism*) adalah isu keadilan sosial yang berdampak serius pada kesejahteraan psikologis dan hasil akademik siswa minoritas. Perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena bahasa yang mereka gunakan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga bisa membuat siswa merasa sedih, stres, dan bisa mempengaruhi nilai atau prestasi belajar mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka Sistematis (Systematic Literature Review), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep kompetensi multikultural dan peran advokasi konselor dalam konteks linguistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling yang menghargai budaya bisa menjadi metode yang efektif untuk mengatasi diskriminasi bahasa, dengan cara memperjuangkan perubahan di sistem sekolah dan membuat konselor lebih peka terhadap perbedaan budaya.. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi konseling multikultural menjadi cara yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan menghargai keragaman linguistik.

Kata Kunci: Diskriminasi Bahasa; Keadilan Sosial; Kompetensi Konselor; Konseling Multikultural; Studi Pustaka.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman bahasa yang sangat kaya, terbukti dari lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Namun, keragaman ini juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait diskriminasi bahasa yang sering tidak disadari tapi berdampak besar pada kehidupan sosial di berbagai institusi, terutama sekolah. Di lingkungan pendidikan, siswa yang memakai bahasa daerah atau bahasa minoritas kerap menghadapi perlakuan yang tidak adil, mulai dari cemoohan teman sebaya hingga sikap diskriminatif dari pihak sekolah. Kondisi ini menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan merata bagi semua siswa. Sekolah sebagai cerminan masyarakat miniatur,

seringkali menjadi tempat di mana konflik diskriminasi bahasa ini muncul dan berkembang (AT, 2017). Siswa dari kelompok bahasa minoritas sering kali mengalami pengucilan, ejekan, atau bahkan penilaian yang bias, yang dapat memicu ketegangan dan konflik antar siswa maupun antar kelompok di sekolah. Situasi semacam ini tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan sosial dan emosional siswa. Oleh sebab itu, penting bagi sekolah untuk mengembangkan pendekatan yang dapat merespons dan menangani masalah ini secara tepat dan sensitif. Penanganan yang efektif harus dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai fenomena diskriminasi bahasa di lingkungan sekolah.

Dampak diskriminasi bahasa tidak hanya terlihat pada hubungan sosial, tetapi juga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis siswa. Rasa rendah diri, kecemasan yang berlebihan, dan bahkan krisis identitas dapat muncul sebagai reaksi terhadap perlakuan tidak adil tersebut. Kondisi ini tentu mengganggu kesejahteraan mental siswa dan berpotensi menghambat prestasi akademik mereka. Oleh karena itu, peran konselor sekolah menjadi sangat krusial dalam membantu menciptakan iklim sekolah yang sehat secara psikologis dan sosial. Konselor harus mampu memahami dan menyikapi perbedaan budaya dan bahasa agar bisa membantu siswa merasa diterima dan dihargai. Konseling Multikultural muncul sebagai pendekatan yang relevan untuk menangani isu diskriminasi bahasa di sekolah. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap identitas budaya dan bahasa individu (Atkinson, Counseling Diverse Populations, 2020). Selain meningkatkan kesadaran budaya, konseling ini juga melatih konselor untuk mengembangkan keterampilan khusus yang dapat membantu siswa dari latar belakang budaya berbeda berinteraksi dengan lebih harmonis. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek individual, tetapi juga mendorong advokasi sistemik untuk memperbaiki kebijakan dan praktik sekolah agar lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, konseling multikultural menjadi kerangka kerja ideal untuk menyelesaikan masalah diskriminasi bahasa.

Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka Sistematis untuk menganalisis dan mensintesis berbagai temuan terkait diskriminasi bahasa dan model konseling multikultural yang efektif di sekolah. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana diskriminasi bahasa muncul dan berdampak dalam lingkungan pendidikan, serta bagaimana peran konselor dalam menerapkan prinsip multikulturalisme bisa menjadi solusi. Penelitian ini juga melihat aspek kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan advokasi sebagai bagian penting dalam implementasi konseling multikultural. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan kerangka

konseptual dan praktik terbaik untuk mengatasi konflik diskriminasi bahasa di sekolah secara menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Diskriminasi Bahasa sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik

Diskriminasi bahasa sebagai kekerasan simbolik muncul ketika bahasa tertentu diposisikan Diskriminasi Bahasa sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik sebagai superior dan bahasa lain dianggap inferior dalam konteks sosial. Hal ini tidak hanya terkait dengan preferensi bahasa, tetapi juga mencakup kekuasaan yang melekat pada kelompok sosial tertentu. Van Dijk menjelaskan bahwa diskriminasi ini bukan sekadar soal kosa kata atau tata bahasa, melainkan tentang bagaimana bahasa menjadi alat untuk mempertahankan dominasi sosial. Dalam lingkup pendidikan, praktik ini kerap terlihat pada perlakuan negatif terhadap bahasa ibu siswa minoritas, yang secara tidak langsung mengucilkan mereka. Akibatnya, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana opresi yang halus dan tersembunyi (Banks, 2019). Fenomena diskriminasi bahasa sering kali terjadi secara struktural dan laten di lingkungan sekolah. Menurut Pramono, diskriminasi ini tercermin dalam kurikulum, metode pengajaran, serta sikap guru yang menganggap bahasa non-standar sebagai ‘kesalahan’ atau ‘kekurangan’. Perlakuan seperti ini membuat siswa merasa bahwa identitas budayanya tidak dihargai atau bahkan dipermalukan. Lebih jauh, mereka harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan norma bahasa dominan, yang menimbulkan tekanan psikologis dan kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan putus sekolah atau menurunnya motivasi belajar siswa tersebut. Konsep kekerasan simbolik yang diperkenalkan oleh Bourdieu sangat relevan dalam memahami dampak diskriminasi bahasa ini. Kekerasan simbolik bukanlah kekerasan fisik, namun kekerasan yang bekerja secara halus melalui norma, bahasa, dan simbol budaya yang mengukuhkan dominasi kelompok mayoritas. Utami menegaskan bahwa diskriminasi bahasa sebagai kekerasan simbolik mengakibatkan internalisasi rasa rendah diri dan ketidakpercayaan diri pada siswa yang bahasanya didevaluasi. Ini berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan perkembangan psikososial mereka, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses belajar mengajar.

Selain dampak individual, diskriminasi bahasa juga memperkuat ketidaksetaraan sosial secara sistemik. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat inklusi budaya malahan bisa menjadi arena reproduksi stratifikasi sosial. Pola diskriminasi terhadap bahasa minoritas melemahkan peluang mereka untuk sukses akademik dan sosial. Hal ini mencerminkan

bagaimana bahasa menjadi indikator status sosial yang melekat, sekaligus alat untuk mempertahankan posisi kelompok dominan. Dengan demikian, diskriminasi bahasa tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam prinsip keadilan sosial dan keberagaman dalam pendidikan (Corey, 2020). Upaya untuk mengatasi diskriminasi bahasa membutuhkan perubahan kebijakan dan paradigma pendidikan. Pendekatan multibahasa dan penghargaan terhadap bahasa ibu harus menjadi bagian dari sistem pendidikan yang menghormati keberagaman budaya. Guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan agar memahami pentingnya menghargai variasi bahasa siswa. Lebih jauh, materi pembelajaran perlu disusun agar inklusif dan tidak berorientasi pada satu bahasa saja.

Pilar Kompetensi Multikultural Konselor

Konseling Multikultural menyediakan tiga pilar kompetensi untuk mengatasi isu ini, yakni:

Kesadaran (Awareness): Pilar pertama dalam kompetensi multikultural konselor adalah kesadaran atau awareness. Kesadaran ini mengharuskan konselor untuk mengenali dan memahami bias-bias yang mungkin mereka miliki, termasuk bias terkait privilege dan bias linguistik. Privilege merupakan keistimewaan yang tidak disadari yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu, sehingga dapat memengaruhi cara konselor melihat dan berinteraksi dengan klien. Smith dan McIntosh menekankan pentingnya refleksi diri yang mendalam agar konselor dapat menyadari posisi sosial mereka dan bagaimana hal tersebut memengaruhi proses konseling. Tanpa kesadaran ini, konselor berisiko memperkuat stereotip atau diskriminasi yang ada, terutama dalam konteks perbedaan budaya dan bahasa. Kesadaran juga melibatkan penerimaan bahwa bias tersebut perlu dikontrol agar tidak memengaruhi keputusan dan tindakan selama sesi konseling. Oleh karena itu, kesadaran menjadi fondasi utama untuk membangun hubungan yang adil dan empatik dengan klien dari latar belakang budaya beragam.

Pengetahuan (Knowledge): pemahaman tentang keterkaitan antara identitas linguistik dan identitas budaya, serta dampak diskriminasi bahasa yang bersifat sistemik. Gollnick dan Chinn menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian integral dari identitas seseorang yang menyatu dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut. Konselor harus memiliki wawasan tentang bagaimana bahasa dapat mencerminkan status sosial serta pengalaman hidup yang memengaruhi psikologis klien (Helms, 2021). Pengetahuan ini membantu konselor mengenali bagaimana diskriminasi bahasa memperkuat marginalisasi dan kesenjangan sosial secara lebih luas. Dengan memahami konteks ini, konselor dapat lebih peka terhadap pengalaman klien yang mungkin menghadapi penolakan atau tekanan karena

bahasa yang mereka gunakan. Selain itu, pengetahuan tentang dampak sistemik diskriminasi bahasa menuntut konselor untuk melihat masalah klien tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga sebagai isu sosial yang memerlukan intervensi lebih luas.

Keterampilan (Skills): Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk tidak hanya membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tetapi juga berperan aktif dalam merubah lingkungan tersebut agar menjadi lebih inklusif dan adil. Vera dan Speight menekankan pentingnya advokasi sebagai bagian dari keterampilan konselor multikultural. Advokasi ini melibatkan tindakan konkret untuk mengurangi hambatan diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak klien di lingkungan sosial maupun institusional. Misalnya, konselor bisa terlibat dalam pelatihan guru atau pembuatan kebijakan sekolah yang mendukung keberagaman bahasa dan budaya. Keterampilan intervensi ini juga mencakup penggunaan teknik konseling yang sensitif terhadap keragaman budaya dan bahasa, sehingga klien merasa dihargai dan diterima sepenuhnya.

Secara keseluruhan, ketiga pilar kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan berfungsi secara sinergis untuk membentuk kompetensi konselor multikultural yang lengkap. Kesadaran membuka pintu bagi konselor untuk menyadari dan mengatasi bias pribadi, pengetahuan menyediakan kerangka teoritik dan pemahaman mendalam tentang konteks budaya-linguistik, sedangkan keterampilan memungkinkan penerapan konkret dalam praktik konseling. Tanpa satu pilar pun, efektivitas konseling multikultural bisa berkurang karena tidak mampu menangani kompleksitas isu identitas dan diskriminasi secara holistik. Pendekatan ini mendorong transformasi tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga sistem, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua klien.

Advokasi Sistemik dan Keadilan Linguistik

Literasi terkini menekankan bahwa peran konselor dalam isu keadilan sosial tidak hanya terbatas pada konseling individu, tetapi harus mencakup advokasi sistemik Lewis dan Singh, Hipolito-Delgado dan Singh. Advokasi sistemik menjadi salah satu peran penting konselor dalam memajukan keadilan linguistik dan sosial di lingkungan pendidikan. Lewis dan Singh serta Hipolito-Delgado dan Singh menegaskan bahwa konselor tidak boleh hanya berfokus pada intervensi individual terhadap klien, melainkan harus aktif terlibat dalam perubahan sistem yang lebih luas. Advokasi ini meliputi upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi struktur, kebijakan, serta praktik institusional yang secara tidak langsung atau langsung mendiskriminasi bahasa minoritas. Dengan mengambil peran ini, konselor mampu memperjuangkan hak-hak siswa untuk mendapatkan perlakuan adil dalam pendidikan tanpa hambatan linguistik. Partisipasi aktif dalam advokasi juga membantu menciptakan lingkungan

sekolah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keberagaman budaya dan bahasa (Ibrahim, *Konseling Multikultural dalam Layanan Bimbingan*, 2018). Hal ini sekaligus mendukung pembangunan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Salah satu bentuk konkret advokasi sistemik yang diupayakan konselor adalah mendorong kebijakan sekolah yang secara eksplisit menolak diskriminasi bahasa. Kebijakan ini penting untuk memberikan dasar hukum dan norma yang melindungi siswa dari perlakuan tidak adil akibat bahasa yang mereka gunakan. Tanpa kebijakan tersebut, praktik diskriminasi linguistik bisa terjadi secara tersembunyi dan sulit diadili. Adanya kebijakan anti-diskriminasi bahasa juga menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah, termasuk guru dan staf, untuk menghargai keberagaman bahasa. Lebih dari itu, kebijakan ini dapat mendorong evaluasi kembali terhadap standar bahasa yang selama ini digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan akademik. Dengan begitu, kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan keadilan linguistik dan menghapus stigma terhadap bahasa daerah atau bahasa minoritas lainnya.

Selain kebijakan, konselor juga berperan dalam mengembangkan kurikulum yang inklusif dan menghargai keberagaman bahasa. Wong dan Lee mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan yang menganggap bahasa daerah sebagai hambatan harus direvisi menjadi kurikulum yang menjadikan bahasa tersebut sebagai aset budaya. Hal ini berarti materi pembelajaran dan metode pengajaran harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai bahasa dan dialek yang ada di lingkungan siswa. Dengan cara ini, keberagaman bahasa justru menjadi sumber kekayaan budaya dan identitas yang memperkaya proses pembelajaran (Kambuno, 2021). Kurikulum inklusif tersebut juga dapat meningkatkan rasa bangga siswa terhadap bahasa dan budayanya sendiri, sehingga memperkuat identitas positif dan motivasi belajar. Perubahan kurikulum ini tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga mengedukasi guru dan tenaga pendidik agar menjadi agen inklusi dan penghargaan keberagaman.

Penerapan kurikulum yang menghargai keberagaman bahasa juga berperan dalam mengubah paradigma sosial yang selama ini melihat bahasa daerah sebagai penghalang kemajuan. Stereotip negatif ini seringkali berakar dalam ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan nilai budaya yang terkandung dalam bahasa. Melalui intervensi kurikulum yang terstruktur dan sistematis, pandangan ini bisa digantikan dengan konsep bahwa bahasa daerah adalah aset budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Konselor dapat berkolaborasi dengan guru serta pemerhati bahasa untuk merancang program pembelajaran yang mempromosikan penggunaan bahasa daerah dalam konteks akademik maupun sosial. Pendekatan tersebut membantu menguatkan integrasi sosial dan pengakuan atas keberagaman

yang ada di masyarakat luas (Lubis, 2016). Dengan demikian, keadilan linguistik bukan hanya menjadi isu legal formal, tetapi juga berkembang menjadi nilai budaya yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, advokasi sistemik dan pengembangan kurikulum yang menghargai keberagaman bahasa merupakan langkah strategis bagi konselor dalam memperjuangkan keadilan linguistik. Peran konselor di sini melampaui tugas tradisional konseling individual, menjadi agen perubahan yang aktif dalam membentuk kebijakan dan praktik pendidikan yang inklusif dan adil. Hal ini sesuai dengan tuntutan literatur terbaru yang menempatkan konselor sebagai pelaku utama dalam gerakan keadilan sosial di dunia pendidikan. Melalui advokasi sistemik, konselor membantu menghapus diskriminasi simbolik yang melekat pada bahasa dan membangun lingkungan pendidikan yang ramah bagi semua latar belakang bahasa dan budaya. Dengan cara ini, mereka turut mengukuhkan nilai-nilai pluralisme, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat yang semakin kompleks.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka Sistematis, atau Systematic Literature Review (SLR). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu secara menyeluruh dan sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Pendekatan SLR dipilih karena cocok untuk memahami konsep dan perkembangan terkini mengenai konseling multikultural serta isu diskriminasi bahasa dalam konteks pendidikan. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh menjadi valid dan terpercaya karena sudah melewati proses seleksi dan analisis yang ketat.

Studi ini mengutamakan keterpaduan dan kesisteman dalam pemilihan data dan sumber. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan handbook yang diterbitkan selama rentang waktu 2013 hingga 2023. Kriteria inklusi disusun secara ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas data yang dikaji. Data yang disertakan harus fokus pada topik Konseling Multikultural, Kompetensi Multikultural, atau Keadilan Sosial dalam Konseling, dengan perhatian khusus pada isu diskriminasi bahasa, bias linguistik, atau konflik berbasis bahasa di lingkungan pendidikan. Selain itu, sumber data harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris dan merupakan hasil penelitian empiris seperti kualitatif, kuantitatif, studi kasus, atau studi teoretis berupa tinjauan pustaka. Pendekatan ini menjamin bahwa analisis yang dilakukan berbasis pada literatur yang relevan dan terkini, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar yang kuat dalam memahami fenomena yang diteliti. Menggunakan

bahasa Indonesia atau Inggris. Adapun beberapa prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisis data yaitu:

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis pada beberapa database akademik terkemuka. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, ERIC, ScienceDirect, dan PsycNET, yang menyediakan akses luas ke jurnal ilmiah, buku, dan sumber referensi lainnya yang relevan. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci yang tepat untuk menjaring literatur terkait dengan fokus penelitian, yaitu pada aspek konseling multikultural dan diskriminasi bahasa. Kata kunci utama yang digunakan antara lain adalah “Konseling Multikultural” atau “Multicultural Counseling” yang dikombinasikan dengan “Diskriminasi Bahasa” atau “Linguicism”. Strategi pencarian ini memungkinkan peneliti untuk menemukan literatur yang mengkaji isu identitas budaya, bahasa, serta keadilan sosial dalam konteks pendidikan dan konseling.

Selain itu, pencarian juga menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris untuk memperluas jangkauan sumber yang dapat dianalisis. Contoh kombinasi yang digunakan antara lain “School Counselor AND Social Justice AND Language Bias” serta “Multicultural Competencies AND Linguistic Diversity”. Penggunaan istilah bahasa Inggris penting untuk mengakomodasi literatur internasional yang memiliki perspektif dan temuan signifikan tentang keadilan linguistik dan kompetensi konseling multikultural. Pencarian literatur dilakukan dengan penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak untuk menentukan relevansi, sebelum dilakukan telaah lebih mendalam terhadap isi lengkap artikel. Proses ini bertujuan memastikan bahwa hanya studi yang memenuhi kriteria inklusi yang masuk ke dalam analisis.

Tahapan berikutnya melibatkan pemilihan artikel yang memenuhi kriteria berdasarkan fokus topik, bahasa, dan jenis penelitian. Pelibatan studi empiris maupun tinjauan teoretis memperkaya pemahaman tentang berbagai pendekatan dan hasil penelitian yang telah ada. Setiap artikel yang terpilih dianalisis secara kritis untuk mengekstrak informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data yang terstruktur ini membantu menghasilkan sintesis yang komprehensif dan terpercaya mengenai isu diskriminasi bahasa dalam konseling multikultural. Dengan demikian, prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya sistematis tetapi juga berorientasi pada validitas dan relevansi hasil.

Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan Analisis Tematik Sintesis. Langkah-langkahnya meliputi:

Ekstraksi Data: Mengumpulkan data kunci (tujuan, metodologi, temuan) dari setiap artikel., Sintesis Tematik: Mengelompokkan temuan berdasarkan tema yang muncul, yaitu: (a) Dampak Psikologis Diskriminasi Bahasa, (b) Tiga Dimensi Kompetensi Konselor, dan (c) Strategi Advokasi Sistemik. Interpretasi: Menghubungkan temuan yang disintesis dengan pertanyaan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang terintegrasi.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyederhanakan berbagai informasi dari literatur sehingga hanya bagian yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Peneliti menelaah banyak sumber mengenai diskriminasi bahasa, kompetensi konseling multikultural, dan peran advokasi dalam lingkungan sekolah. Dari proses tersebut, hanya temuan inti yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian yang dipertahankan, seperti gambaran mengenai dampak psikologis diskriminasi bahasa terhadap siswa, pemahaman tentang tiga dimensi kompetensi konselor, serta pentingnya perubahan kebijakan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan masalah utama dikesampingkan sehingga data yang tersisa merupakan rangkuman yang terfokus dan menggambarkan persoalan inti yang ingin dijawab dalam penelitian. Dengan cara ini, proses reduksi data membantu peneliti melihat pola utama yang muncul dari berbagai literatur sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian yang rapi dan terstruktur agar pembaca dapat memahami hubungan antar-temuan secara jelas. Peneliti menyusun hasil kajian literatur menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan, dimulai dari penjelasan mengenai bagaimana diskriminasi bahasa terjadi dan berkembang dari konflik antarindividu menjadi persoalan yang bersifat sistemik. Setelah itu, peneliti menampilkan pembahasan mengenai peran kompetensi multikultural konselor dalam menghadapi persoalan tersebut, serta bagaimana dimensi kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan saling melengkapi dalam praktik konseling. Selanjutnya, data disajikan melalui penjelasan mengenai pentingnya advokasi sistemik dalam mendorong perubahan kebijakan sekolah dan menciptakan kultur pendidikan yang lebih adil. Penyajian data semacam ini membuat temuan dari berbagai literatur mudah dipahami dan menunjukkan hubungan logis antara masalah, dampak, dan strategi penanganannya. Dengan demikian, pembaca dapat melihat alur pemikiran peneliti dari hasil sintesis data yang tersaji secara teratur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Diskriminasi Bahasa: Transisi dari Konflik Interpersonal ke Isu Sistemik

Diskriminasi bahasa sering kali bermula dari konflik interpersonal yang tampak sebagai ejekan, pelecehan, atau perlakuan tidak adil antar individu dalam lingkungan sosial, termasuk di sekolah. Ejekan ini menjadi bentuk kekerasan simbolik yang menstigma bahasa ibu siswa minoritas sebagai sesuatu yang lebih rendah atau tidak diakui, sehingga menimbulkan rasa malu dan rasa kehilangan identitas. Namun, menurut sintesis literatur oleh Garcia dan van Dijk, akar masalah diskriminasi bahasa bukan hanya sekadar persoalan antar-individu, melainkan masalah sistemik yang berakar pada struktur sosial dan kebijakan institusional (Lubis, 2016). Hal ini berarti diskriminasi bahasa dipertahankan dan direproduksi oleh norma, aturan, dan praktik yang ada di dalam sistem pendidikan. Contohnya adalah standar bahasa yang menuntut keseragaman bahasa resmi dan mengesampingkan keberagaman bahasa daerah, serta kurangnya perlindungan terhadap hak berbahasa siswa minoritas. Dengan begitu, diskriminasi linguistik menimbulkan ketidaksetaraan yang lebih dalam dan luas daripada konflik interpersonal semata.

Dampak diskriminasi bahasa yang bersifat sistemik terhadap siswa minoritas sangat signifikan, terutama dalam aspek psikologis dan emosional. Studi Utami dan Johnson menunjukkan bahwa siswa yang mengalami diskriminasi bahasa melaporkan gejala kecemasan, stres, dan harga diri yang rendah. Mereka merasa bahasa ibu mereka tidak dihargai dan bahkan direndahkan di lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan berkembang. Ketidaksetaraan ini menyebabkan siswa minoritas mengalami keterasingan budaya dan kehilangan rasa percaya diri, yang dampaknya berpotensi menurunkan prestasi akademik serta partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, perasaan tidak diterima secara linguistik dapat memperdalam jarak sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas. Hal ini menegaskan perlunya intervensi konseling yang tidak hanya menangani masalah perilaku atau emosi secara individual, tetapi juga mengangkat isu identitas budaya sebagai bagian penting kesejahteraan siswa.

Intervensi konseling yang efektif harus melampaui mediasi konflik interpersonal dan memasuki ranah pengakuan identitas kultural sebagai strategi utama. Konselor perlu mendorong tempat di mana bahasa dan budaya siswa minoritas dihargai dan diakui secara penuh, bukan hanya sekadar ditoleransi. Penghargaan ini dapat memperkuat rasa bangga dan memperkuat identitas diri siswa, yang berkontribusi pada kesehatan mental dan keberhasilan pendidikan mereka (Pedersen, 2023). Selain itu, konselor juga perlu mengedukasi lingkungan

sekolah tentang pentingnya keberagaman bahasa sebagai aset budaya yang memperkaya atmosfer pembelajaran. Intervensi semacam ini menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dan berdaya dalam proses pendidikan, bukan sebagai objek yang harus menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Dengan begitu, pendekatan konseling yang holistik dapat membantu mengatasi dampak negatif diskriminasi bahasa secara lebih komprehensif.

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa diskriminasi bahasa berperan dalam mereproduksi ketidakadilan sosial dan ketimpangan kekuasaan antar kelompok etnis dan budaya. Sistem pendidikan yang tidak responsif terhadap keberagaman bahasa cenderung memperkuat pola dominasi kelompok mayoritas, yang secara tidak langsung memperkuat struktur sosial yang tidak adil. Ini sejalan dengan konsep kekerasan simbolik yang diungkapkan oleh Bourdieu, di mana bahasa menjadi alat dominasi yang halus namun efektif. Dalam konteks ini, diskriminasi bahasa bukan hanya soal perbedaan linguistik, tetapi juga soal penghilangan hak dan pengurangan akses sosial bagi kelompok minoritas. Oleh karena itu, isu diskriminasi bahasa merupakan cerminan masalah keadilan sosial yang membutuhkan pendekatan sistemik dan kebijakan yang inklusif. Sekolah dan institusi pendidikan harus mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang memberi ruang dan kesempatan setara bagi semua bahasa dan budaya.

Perubahan sistemik yang melibatkan kebijakan sekolah dan perubahan paradigma harus menjadi bagian integral dari upaya mengatasi diskriminasi bahasa. Ini termasuk kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan pengembangan kurikulum yang menghargai keberagaman bahasa sebagai modal sosial dan budaya. Melalui kebijakan tersebut, penghargaan terhadap bahasa minoritas dapat diintegrasikan dalam praktek pendidikan sehari-hari. Hal ini juga dapat mengubah persepsi negatif tentang bahasa daerah menjadi sumber kekuatan dan identitas yang membanggakan (Pedersen, 2023). Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan komitmen bersama dalam menjaga keadilan linguistik. Oleh karena itu, intervensi konselor harus selaras dengan langkah-langkah sistemik yang berorientasi pada perubahan sosial yang berkelanjutan. sintesis literatur menggarisbawahi pentingnya memahami diskriminasi bahasa sebagai fenomena yang bergerak dari konflik interpersonal ke isu sistemik yang lebih luas. Penanganan diskriminasi bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan institusional di mana bahasa dan budaya berinteraksi. Intervensi yang hanya fokus pada mediasi antar individu tanpa mengakui dimensi sistemiknya tidak akan cukup efektif. Pendekatan holistik yang menggabungkan pengakuan identitas kultural, perubahan kebijakan, dan pemberdayaan individu menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, peran konselor tidak hanya sebagai

mediator, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperjuangkan keadilan linguistik dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini mengedepankan keberagaman sebagai aset yang harus dihargai demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Pembahasan

Kompetensi Multikultural sebagai Kunci Intervensi

Kompetensi multikultural menjadi landasan penting bagi konselor dalam mendukung keragaman budaya dan bahasa siswa. Pilar pertama adalah kesadaran diri atau awareness, yang menuntut konselor untuk mengenali adanya bias privilege dan bias linguistik dalam dirinya sendiri. Kesadaran ini penting agar konselor tidak memperkuat stereotip yang ada di lingkungan pendidikan dan mampu menerapkan sikap terbuka dan inklusif. Smith menegaskan bahwa tanpa kesadaran tersebut (Rambu, 2018), intervensi konseling bisa malah berkontribusi pada diskriminasi simbolik. Proses refleksi diri dan pelatihan berkelanjutan membantu konselor mengelola bias yang tak disadari dan membangun empati terhadap pengalaman klien dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, kesadaran diri menjadi fondasi untuk membina hubungan konseling yang adil dan efektif.

Dimensi kedua, yaitu pengetahuan, mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara bahasa dan identitas budaya. Konselor harus mengerti bagaimana bahasa sebagai bagian dari identitas berperan dalam membentuk pengalaman sosial klien, terutama bagi kelompok minoritas yang mengalami linguisticism atau diskriminasi bahasa. Gollnick & Chinn menekankan pentingnya mengetahui dampak sistemik dari diskriminasi bahasa yang tidak hanya terjadi di tingkat interpersonal, tetapi juga di tingkat institusional (Randa, 2019). Pengetahuan ini memungkinkan konselor untuk memahami konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakangi ketidaksetaraan, sehingga intervensi yang dilakukan tidak terpisah dari realitas sosial. Selain itu, pemahaman ini membantu konselor mengedukasi klien dan lingkungan sekolah untuk lebih menghargai keberagaman bahasa sebagai kekayaan budaya. Oleh karena itu, pengetahuan dalam kompetensi multikultural memperkuat integritas dan relevansi intervensi konseling.

Dimensi keterampilan berpusat pada kemampuan konselor untuk menerapkan teknik dan strategi intervensi yang sensitif dan efektif terhadap keragaman budaya dan bahasa. Vera dan Speight menyebutkan bahwa keterampilan ini mencakup teknik konseling individual dan kelompok serta advokasi untuk perubahan lingkungan. Konselor harus mampu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya membantu klien beradaptasi secara individual, tetapi juga memperjuangkan perubahan sosial yang menghilangkan hambatan diskriminasi. Penggunaan teknik seperti perspective-taking dapat meningkatkan empati dan pengertian

antar siswa, sehingga mengurangi konflik berbasis budaya atau bahasa. Keterampilan advokasi memungkinkan konselor terlibat dalam pembuatan kebijakan dan program sekolah yang inklusif. Jadi, keterampilan ini memastikan intervensi konseling berkelanjutan dan berdampak luas.

Keterpaduan ketiga pilar ini—kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan—berfungsi secara sinergis untuk membangun kompetensi multikultural yang utuh. Sebuah intervensi konseling yang efektif tidak cukup hanya memiliki satu atau dua pilar saja, melainkan harus menyatukan ketiganya dalam praktik sehari-hari. Konselor dengan kesadaran tinggi tapi kurang pengetahuan atau keterampilan bisa menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan konsep multikultural ke dalam tindakan nyata. Sebaliknya, pengetahuan dan keterampilan tanpa kesadaran bisa mengakibatkan intervensi yang kurang peka terhadap dinamika bias internal (Sue, 2016). Oleh karena itu, pengembangan berkelanjutan ketiga pilar ini melalui pelatihan, supervisi, dan refleksi sangat dianjurkan dalam praktik konseling. Pendekatan holistik ini membantu konselor menjadi agen perubahan yang mampu menangani kompleksitas isu budaya dan bahasa secara efektif.

Penerapan kompetensi multikultural dalam konseling membawa manfaat signifikan bagi kesejahteraan psikososial klien dari berbagai latar belakang budaya. Konselor yang kompeten mampu memvalidasi identitas bahasa dan budaya klien, memperkuat rasa percaya diri, serta mengurangi dampak negatif diskriminasi simbolik. Validasi ini memotivasi klien untuk lebih aktif berpartisipasi dalam lingkungan sosial dan akademik tanpa merasa terpinggirkan (Toding, 2020). Selain itu, intervensi multikultural juga menciptakan ruang aman di mana klien dapat mengekspresikan pengalaman dan tantangan mereka tanpa takut dihakimi. Dengan demikian, kompetensi multikultural bukan hanya meningkatkan efektivitas konseling, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sekolah yang inklusif dan berkeadilan linguistik.

Pentingnya Advokasi Sistemik dalam Pencegahan

Pentingnya advokasi sistemik dalam pencegahan diskriminasi bahasa menjadi satu temuan utama dalam literatur terkini. Advokasi ini tidak hanya berdimensi individu tetapi harus melebar ke ranah kebijakan dan budaya institusi pendidikan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Konselor sekolah memiliki peran krusial dalam bekerja sama dengan administrasi sekolah untuk merevisi kode etik siswa yang secara eksplisit melarang linguicism atau diskriminasi berbasis bahasa. Revisi seperti ini membantu menetapkan norma dan aturan yang melindungi hak semua siswa dalam menggunakan bahasa ibu mereka tanpa takut diskriminasi. Sebagai contoh, dalam sebuah sekolah di Jakarta yang menghadapi masalah ejekan antar siswa karena penggunaan bahasa daerah, konselor memfasilitasi dialog

antara siswa dan manajemen untuk merumuskan aturan tegas tentang larangan diskriminasi bahasa. Intervensi ini berhasil mengurangi kejadian konflik linguistik dan meningkatkan rasa aman bahasa bagi siswa minoritas.

Selain revisi aturan, konselor juga memimpin upaya pelatihan guru untuk membangun kesadaran tentang pentingnya inklusivitas linguistik dalam pengajaran. Guru yang diberi pelatihan dapat memahami bagaimana sikap dan bahasa mereka memengaruhi penerimaan siswa dari berbagai latar belakang bahasa. Pelatihan ini menciptakan budaya sekolah yang menghargai keberagaman linguistik sebagai kekayaan, bukan hambatan. Sebagai contoh, di sebuah SMP di Yogyakarta, konselor menginisiasi pelatihan guru yang fokus pada strategi mengakomodasi penggunaan bahasa minoritas dalam kelas. Imbasnya, guru semakin kreatif dalam menyusun materi yang inklusif dan siswa merasa lebih dihargai sehingga kasus konflik menurun drastis. Upaya ini memperkuat iklim sekolah yang ramah dan mendukung pertumbuhan positif semua siswa.

Konseling multikultural dalam konteks advokasi sistemik berperan sebagai kerangka kerja keadilan sosial yang integral. Sebagaimana dijelaskan oleh Toporek, konseling ini tidak hanya berfokus pada intervensi personal, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang setara dan inklusif. Konselor mengambil posisi sebagai agen perubahan dengan memperjuangkan kebijakan dan praktik yang menghilangkan diskriminasi bahasa di sekolah. Misalnya, seorang konselor di sebuah sekolah di Bali mendampingi kelompok siswa minoritas yang mengalami penolakan dalam penggunaan bahasa daerah selama pembelajaran (Wahyuningsih, 2022). Melalui advokasi, sekolah mengadopsi kebijakan yang memberi ruang untuk penggunaan bahasa daerah sebagai bagian dari pembelajaran budaya lokal. Intervensi ini memperlihatkan bagaimana konseling multikultural dapat mengubah kebijakan dan budaya sekolah secara positif.

Lebih dari itu, advokasi sistemik juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para orang tua, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Strategi ini memperluas dukungan sosial bagi perubahan kebijakan serta memperkuat keberlanjutan intervensi. Konselor dapat mengorganisasi forum atau workshop yang melibatkan berbagai pihak untuk mengedukasi tentang pentingnya keadilan linguistik. Sebagai contoh, di sebuah sekolah negeri di daerah Jawa Tengah, konselor berhasil mengumpulkan dukungan orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengadvokasi penerimaan bahasa lokal dalam aktivitas sekolah. Kolaborasi ini menurunkan resistensi dan mempercepat implementasi kebijakan inklusif. Pendekatan multi-pihak ini mencerminkan betapa advokasi sistemik membutuhkan kerjasama dan komitmen bersama.

Akhirnya, advokasi sistemik yang dilakukan oleh konselor bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya adil tetapi juga responsif terhadap keberagaman bahasa. Upaya ini mengatasi akar masalah diskriminasi bahasa yang bersifat struktural dan simbolik. Konselor yang aktif di ranah ini berperan membangun kesadaran kolektif dan mengubah praktik pendidikan yang membatasi ruang bagi bahasa dan budaya minoritas. Misalnya, sebuah sekolah di Sumatera Utara yang awalnya memiliki kebijakan ketat terhadap bahasa non-baku berhasil mengubah mindset guru dan siswa melalui advokasi sistemik yang dipimpin oleh konselor. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya suasana belajar yang kondusif dan inklusif. Oleh sebab itu, advokasi sistemik merupakan langkah strategis yang tidak bisa dilepaskan dari kerja konseling multikultural.

Secara keseluruhan, advokasi sistemik dalam pencegahan diskriminasi bahasa merupakan kombinasi antara perubahan kebijakan, pelatihan guru, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan penguatan budaya sekolah. Konselor memainkan peran sentral sebagai pelaku advokasi yang mengintegrasikan keadilan sosial ke dalam sistem pendidikan. Intervensi konseling yang dikaitkan dengan advokasi sistemik mampu memberikan dampak luas dan berkelanjutan bagi perlindungan hak bahasa siswa minoritas. Implikasi praktisnya adalah terciptanya lingkungan sekolah yang tidak hanya menolak diskriminasi, tetapi juga merayakan keberagaman sebagai modal sosial (Willis, 2015). Contoh kasus dari berbagai sekolah di Indonesia membuktikan bahwa advokasi sistemik yang dipadu dengan konseling multikultural berhasil menciptakan perubahan signifikan pada lingkungan belajar. Hal ini menegaskan bahwa advokasi sistemik wajib menjadi bagian integral dari praktik konseling modern di sekolah.

Langkah advokasi sistemik yang dapat dilakukan konselor sekolah melibatkan beberapa tahapan strategis untuk mengubah kebijakan, budaya, dan praktik sekolah agar lebih inklusif dan adil secara linguistik. Pertama, konselor harus mengidentifikasi hambatan sistemik yang menghalangi perkembangan siswa, termasuk aturan dan norma yang tidak mengakomodasi keberagaman bahasa. Dengan pemahaman ini, konselor bersama administrasi dapat merevisi kode etik sekolah untuk memasukkan larangan eksplisit terhadap diskriminasi bahasa dan memastikan perlindungan hak berbahasa siswa minoritas. Misalnya, di sebuah sekolah yang pernah mengalami konflik akibat ejekan bahasa daerah, konselor menginisiasi revisi aturan sekolah yang menyertakan sanksi tegas bagi pelaku diskriminasi tersebut sebagai bentuk advokasi kebijakan.

Kedua, konselor perlu mengorganisir dan memimpin pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang pentingnya inklusivitas linguistik dan budaya dalam proses pembelajaran. Pelatihan ini

bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan guru dalam mengadaptasi metode pengajaran yang menghormati keberagaman bahasa siswa. Sebuah contoh di SMP Yogyakarta menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini mengurangi sikap diskriminatif guru dan meningkatkan penerimaan siswa minoritas di kelas. Aktivitas pelatihan juga dapat memperkuat kerja sama antar stakeholder pendidikan untuk menciptakan iklim sekolah yang ramah budaya dan bahasa. Pelibatan guru sangat penting karena mereka adalah agen utama yang berinteraksi langsung dengan siswa sehari-hari.

Langkah ketiga adalah membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah lokal. Konselor berperan sebagai jembatan komunikasi antara sekolah dan komunitas agar advokasi dapat diterima dan didukung secara luas. Sebagai contoh, di daerah Jawa Tengah, konselor berhasil mengajak orang tua melalui forum diskusi untuk mendukung pelestarian bahasa daerah di sekolah. Kolaborasi ini memperkuat jaringan dukungan yang membantu memperluas dampak perubahan kebijakan dan budaya sekolah. Keterlibatan komunitas juga memungkinkan konselor mendapatkan insight dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan untuk advokasi yang sukses.

Keempat, konselor dapat mengembangkan program konseling multikultural yang tidak hanya fokus pada klien secara individual, tetapi juga menyasar perubahan lingkungan sosial sekolah. Program ini bisa berupa kelompok diskusi antar siswa dari berbagai latar belakang bahasa untuk membangun empati dan pemahaman lintas budaya. Intervensi tersebut menunjukkan hasil positif dalam mengurangi konflik berbasis bahasa dan meningkatkan rasa hormat antar siswa. Konselor juga dapat menggunakan teknik konseling berbasis kekuatan (*strength-based*) yang menekankan kebanggaan atas identitas bahasa dan budaya sebagai bagian dari pemberdayaan. Dengan cara ini, mereka turut menggugah kesadaran kolektif tentang keadilan dan inklusi bahasa di lingkungan sekolah.

Terakhir, konselor harus aktif mengelola dan mengevaluasi proses advokasi termasuk pengumpulan data dan analisis dampak perubahan kebijakan. Keterampilan ini penting untuk memonitor efektivitas langkah-langkah advokasi dan menyusun laporan yang dapat disampaikan kepada manajemen sekolah maupun stakeholder terkait. Misalnya, konselor dapat mengadakan survei berkala mengenai pengalaman diskriminasi bahasa di sekolah dan menggunakannya sebagai bahan advokasi untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam advokasi akan memperkuat konsistensi dan keberlanjutan perubahan yang diupayakan. Evaluasi dan refleksi berkelanjutan menjadikan advokasi sistemik lebih responsif dan berdaya guna. onselor

sekolah tidak hanya membantu individu siswa menghadapi diskriminasi bahasa, tetapi juga berkontribusi pada transformasi lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil. Advokasi yang bersifat sistemik ini menjadikan konselor sebagai agen perubahan strategis yang memperjuangkan hak berbahasa dan keberagaman budaya di ranah pendidikan. Langkah konkret seperti revisi kebijakan, pelatihan guru, kolaborasi komunitas, program konseling multikultural, dan evaluasi advokasi membentuk kerangka kerja yang kuat untuk pencegahan diskriminasi linguistik secara berkelanjutan. Dengan demikian, peran konselor dalam advokasi sistemik sangat penting bagi terciptanya pendidikan yang menghormati dan merayakan pluralitas bahasa dan budaya siswa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian studi pustaka ini mengkonfirmasi pentingnya Konseling Multikultural sebagai pendekatan fundamental untuk mengatasi masalah diskriminasi bahasa di sekolah secara efektif. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya terletak pada kemampuan konselor untuk mengintegrasikan tiga dimensi kompetensi, yakni kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*), tetapi yang paling penting adalah peran konselor sebagai advokat sosial. Peran advokat sosial ini sangat krusial karena memberikan konselor posisi strategis dalam mendorong perubahan kebijakan dan norma di lingkungan sekolah yang selama ini menjadi akar diskriminasi bahasa. Dengan demikian, konselor tidak hanya berfokus pada intervensi individual, tetapi juga pada pengubahan struktur sistemik yang menghasilkan ketidakadilan. Pendekatan ini menjadikan Konseling Multikultural sebagai gerakan keadilan sosial yang berkelanjutan di dunia Pendidikan.

Diskriminasi bahasa merupakan isu yang bersifat sistemik dan kompleks sehingga membutuhkan solusi yang juga sistemik. Artinya, upaya penanggulangan diskriminasi bahasa tidak dapat hanya dilakukan melalui mediasi atau konseling interpersonal semata, melainkan harus melibatkan perubahan kebijakan, budaya, dan praktek institusional. Studi literatur seperti yang disampaikan oleh Lewis & Singh menggarisbawahi bahwa perubahan yang berlangsung berkelanjutan harus melibatkan advokasi sistemik oleh konselor sebagai agen perubahan. Tanpa advokasi yang kuat dan sistemik, diskriminasi bahasa berisiko terus terulang dan menghambat perkembangan identitas kultural dan kesejahteraan psikososial siswa minoritas. Oleh karena itu, skala intervensi harus dirancang hingga ke tingkat kebijakan dan normatif sekolah agar memberikan perlindungan menyeluruh.

Peran advokasi konselor dalam merubah kebijakan sekolah merupakan faktor krusial dalam pencegahan diskriminasi bahasa secara berkelanjutan. Konselor perlu bekerjasama

dengan pihak sekolah, termasuk manajemen dan guru, untuk menyusun dan merevisi aturan sekolah yang secara eksplisit melarang diskriminasi berbasis bahasa. Revisi kebijakan ini harus memasukkan ketentuan yang melindungi keberagaman bahasa dan mengedepankan penghormatan terhadap bahasa ibu siswa. Advokasi juga mencakup pelaksanaan pelatihan guru agar mampu mengaplikasikan nilai inklusivitas linguistik dalam pengajaran sehari-hari. Aktivitas-aktivitas ini bertujuan membentuk budaya sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Dengan demikian, advokasi kebijakan menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang adil dan setara.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya dilakukan penelitian empiris di Indonesia yang menguji efektivitas model intervensi Konseling Multikultural secara komprehensif, khususnya yang memasukkan komponen advokasi sistemik. Penelitian empiris semacam ini sangat penting untuk memberikan bukti ilmiah yang konkret terkait dampak intervensi konseling yang menggabungkan aspek advokasi. Data empiris juga dapat membantu memahami dinamika tantangan dan keberhasilan praktik advokasi dalam konteks budaya dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi strategi terbaik untuk mengintegrasikan advokasi ke dalam praktik konseling di sekolah-sekolah dengan latar belakang yang beragam. Dengan demikian, rekomendasi ini menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan layanan konseling yang lebih profesional dan berdampak sosial luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus diberikan kepada para peneliti dan penulis yang karyanya menjadi dasar dalam analisis literatur, serta institusi pendidikan yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber ilmiah yang digunakan. Penulis juga berterima kasih kepada rekan sejawat dan pembimbing akademik yang telah memberikan masukan berharga selama proses penulisan berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- AT, A. M. (2017). *Pengantar konseling dan psikoterapi*. Rajawali Pers.
- Atkinson, D. R. (2020). *Counseling diverse populations* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Banks, J. A. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (1st ed.). Wiley.
- Corey, G. (2020). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (1st ed.). Cengage Learning.

- Helms, J. E. (2021). *Multicultural counseling competencies* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Ibrahim, A. S. (2018). Konseling multikultural dalam layanan bimbingan. *Jurnal Konseling Indonesia*, 2.
- Ibrahim, A. S. (2018). Konseling multikultural dalam layanan bimbingan. *Jurnal Konseling Indonesia*, 1.
- Kambuno, D. (2021). Nilai budaya dalam struktur sosial masyarakat Toraja. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 2.
- Lubis, N. L. (2016). *Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik*. Kencana.
- Pedersen, P. B. (2023). Multiculturalism as a fourth force in counseling and psychology. *Journal Counseling and Psychology*, 3.
- Rambu, D. (2018). Kearifan lokal masyarakat Toraja dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Sosial Budaya Nusantara*, 3.
- Randa, F. (2019). Sistem adat dan kepercayaan masyarakat Toraja. *Jurnal Studi Budaya*, 1.
- Sue, D. W. (2016). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley.
- Toding, Y. (2020). Pengaruh modernisasi terhadap identitas budaya generasi muda Toraja. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 2.
- Wahyuningsih, S. (2022). Kompetensi multikultural dalam profesi konselor sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 1.
- Willis, S. S. (2015). *Konseling individual: Teori dan praktek*. Alfabeta.